LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

PILAR
PSDKP

PANGKALAN PSDKP BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#PILARPSDKP #Profesional Integritas Loyalitas inovAtif sineRgi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2021 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 17 Januari 2022
Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19750102 200502 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Pangkalan PSDKP Batam telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Terdapat 7 Sasaran Stretegis (SS) Pangkalan PSKDP Batam yaitu:

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat;
4. Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP;
5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik;

Seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sebesar **107,10%** dengan rincian capaian sebagai berikut.

Sasaran Strategis (SS)				
Indikator Kinerja Utama (IKU)		**Nilai Capaian IKU**		
Kode IKU	**Uraian**	**Target 2021**	**Capaian 2021**	**%**
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Kelautan (SS1)				
IKU1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	95	100	105,26
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Perikanan (SS2)				
IKU2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	100	100	100,00
Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat (SS3)				
IKU3	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas	71	100	120,00
Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP (SS4)				
IKU4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	2,76	3,19	115,58
IKU5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,35	0,36	102,86
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan (SS5)				
IKU6	Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C	100	100	100,00
IKU7	Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100	100	100,00
Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (SS6)				
IKU8	Persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	99,03	106,48
IKU9	Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	99,22	106,69
Tata kelola pemerintahan yang baik (SS7)				

IKU10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	91,40	114,25
IK11	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	78,41	104,55
IK12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	73	79,03	108,26
IK13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	96,70	107,44
IK14	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1	1	100,00
IK15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72,5	100	120,00
IK16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72,5	89,73	120,00
IK17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	84	89,72	120,00
IK18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	89	97,08	109,08
IK19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	86	86,03	100,03

Terkait dengan pengelolaan anggaran, alokasi DIPA Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sebesar Rp. 79.926.165.000,-. Kemudian diadakan revisi menjadi sebesar Rp. 67.770.785.000.,-. Pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp. 66.848.932.086,- atau 98,64%. Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 107,10% menunjukan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Untuk kedepannya demi menunjang penyelesaian pelaporan kinerja, Maka diperlukan percepatan penyelesaian penghitungan Indikator Kinerja hasil dengan monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah dalam pengolahan dan rekapitulasi data.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP 2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam 3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 9
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 9
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam 9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 14
3.1 Akuntabilitas Kinerja 14
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja 15
3.3 Akuntabilitas Keuangan 54
BAB IV PENUTUP 59
5.1 Kesimpulan 59
5.2 Rekomendasi 59
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021 11
2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021 12
3. Capaian Kinerja Pangkalan SDKP Batam Tahun 2021 14
4. Realisasi Anggaran Tahun 2021 55
5. Efisiensi Anggaran Tahun 2021 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Struktur Organisasi 5

2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam 8

3. Grafik Manajemen Pengetahuan 51

4. Formula Penilaian IKPA Tahun 2021 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melalukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan selama 3 (tiga) bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai Laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2021.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Penangkapan Ikan
    a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA); dan
    b. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
    a. Masih terjadinya kegiatan penangkapan Ikan Menggunakan Bahan atau Alat yang merusak (*Destructive Fishing);*
    b. Adanya kegiatan Reklamasi yang masih belum melengkapi perizinan; dan
    c. Adanya kegiatan penyelundupan *Baby Lobster* (BL) ke luar negeri.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelauatan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2021, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
    a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Peraiaran;
    b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindunngi;
    c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;
    d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
    e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
    f. Pengawasan terhadapa adanya Kegiatan *Destrutive Fishing;*
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
    a. Pengawasan Kapal Perikanan;
    b. Pengawasan Usaha Budidaya perikanan;
    c. Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
    d. Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan.
3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
4. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat;*
5. Pendampingan POKMASWAS;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPP; dan
7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 160 pegawai yang terdiri dari 91 PNS dan 69 tenaga kontrak sebagaimana gambar 1 berikut.

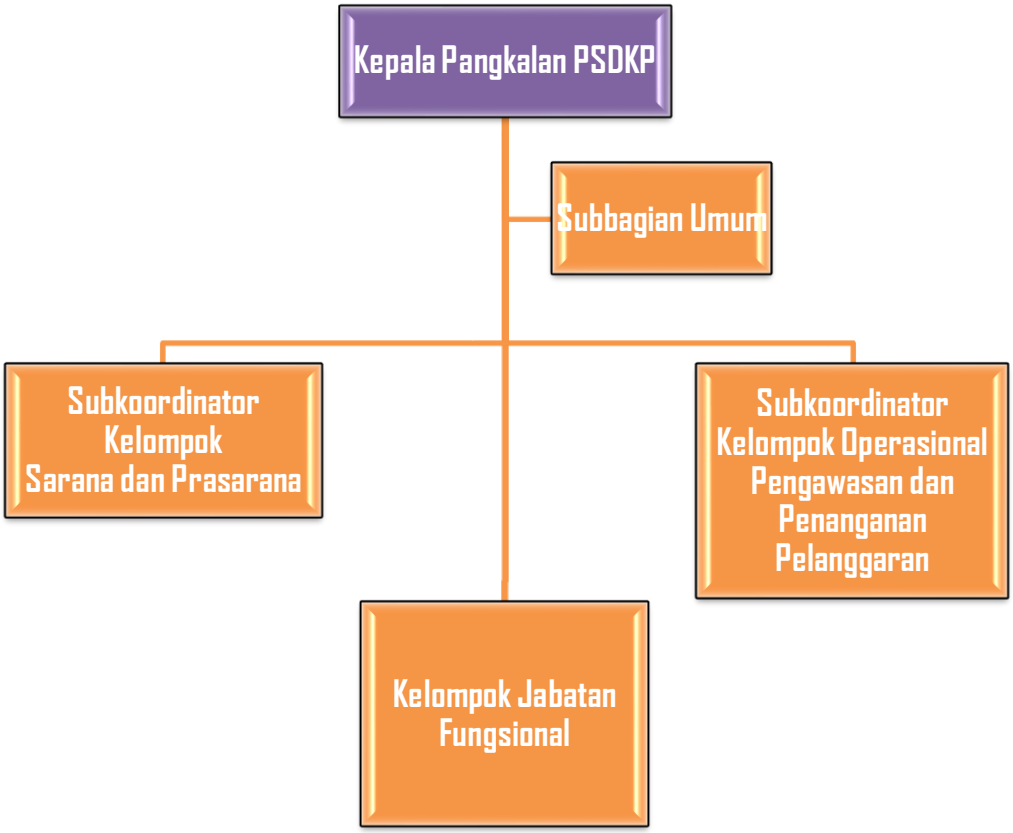

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing kelompok Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, prodram dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasu, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;

b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin,kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan,penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang miliknegara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Subkoordinator Kelompok Sarana dan Prasarana

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastrukur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Subkoordinator Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan maupun Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan maupun penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah adminstratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

a) Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2021.

c) Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021.

d) Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Pangkalan PSDKP Batam pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP. Dalam implementasinya, Renstra tersebut dijadikan acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Pangkalan PSDKP Batam dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam

A. Visi

Visi Pangkalan PSDKP Batam 2020 - 2024 adalah "Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab"

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pangkalan PSDKP Batam 2020 – 2024, maka ditetapkan Misi Pangkalan PSDKP Batam yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pangkalan PSDKP Batam maka dirumuskan beberapa tujuan, yaitu:

1. Peningkatan konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui optimalnya pengawasan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dna wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4)sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam selama tahun 2021 mengalami dua kali revisi. Revisi pertama dilakukan hanya pada anggaran yang semula Rp. 66.118.565.000,- menjadi Rp. 80.587.165.000,- dan dilaksanakan pada bulan April 2021, untuk target kegiatan tidak mengalami perubahan. Kemudian revisi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 yang merevisi anggaran dan terget kinerja dan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SEMULA		MENJADI	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1.	4. Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP	6. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	0,69 %	3.063.246.000	0,35%	1.962.287.000

Adapun Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	2,76
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	0,35
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6. Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C (%)	100
		7. Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)	100
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	8. Persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
		9. Persentase Penyelesaian Penanganan barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Batam	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam [Indeks]	80
		11. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	73
		13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1

		15. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	72,5
		16. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	72,5
		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup (%)	84
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	86

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan yang didukung Aplikasi "**Kinerjaku**" yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pengelolan kinerja pada Tahun 2021, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 7 Sasaran Strategis (SS) dengan 10 IKU dan 9 IK. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021

Sasaran Strategis (SS)				
Indikator Kinerja Utama (IKU)		**Nilai Capaian IKU**		
Kode IKU	**Uraian**	**Target 2021**	**Capaian 2021**	**%**
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Kelautan (SS1)				
IKU1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	95	100	105,26
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Perikanan (SS2)				
IKU2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	100	100	100,00
Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat (SS3)				
IKU3	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas	71	100	120,00
Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP (SS4)				
IKU4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	2,76	3,19	115,58
IKU5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,35	0,36	102,86
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan (SS5)				
IKU6	Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C	100	100	100,00
IKU7	Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100	100	100,00
Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (SS6)				
IKU8	Persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	99,03	106,48
IKU9	Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	99,22	106,69
Tata kelola pemerintahan yang baik (SS7)				
IKU10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	91,40	114,25
IK11	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	78,41	104,55
IK12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	73	79,03	108,26

IK13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	96,70	107,44
IK14	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1	1	100,00
IK15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72,5	100	120,00
IK16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72,5	89,73	120,00
IK17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	84	89,72	120,00
IK18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	89	97,08	109,08
IK19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	86	86,03	100,03

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2021 adalah membandingkan capaian Tahun 2021 dengan Target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2021.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada Tahun 2021 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 1 (*Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Kelautan*)** yaitu:

1) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	-	-	95	100	105,26	95

Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari perhitungan 6 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$x_k = \frac{(x_{kid} + x_{pjk} + x_{pppk} + x_{prl} + x_{kons} + x_{df})}{n}$$

x_k : Persentase pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

x_{kid} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan jenis ikan dilindungi

x_{pjk} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan

x_{pppk}: Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

x_{prl}: Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

x_{kons}: Persentase penyelesaian pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi nasional

x_{df} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

n : Jumlah komponen kepatuhan di UPT

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Xk = \frac{(100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100)}{6}$$

$$Xk = 100\%$$

Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2020 adalah 100 % yang terbentuk dari:

a) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 yaitu 4 pelaku

usaha. Capaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dengan lokasi 1 pelaku usaha Bintan, 1 pelaku usaha di Natuna dan 1 pelaku usaha Anambas. Adapun jenis ikan yang diawasi yaitu : Kura-kura, Labi-labi, ikan aligator dan ikan Napoleon.

Adapun anggaran tahun 2021 untuk pengawasan usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP sebesar Rp. 37.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.849.700,- atau 98,27%.

b) Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sebanyak 21 pelaku usaha yang terdiri dari 15 pelaku usaha wisata bahari yang terdiri 8 pelaku usaha di Bintan, 4 pelaku usaha di Bangka, 3 pelaku usaha di Batam. Kemudian 4 pelaku usaha pengelolaan pasir di Tanjung Balai Karimun serta 2 pelaku usaha pengelolaan BMKT yaitu di Batam dan Bintan.

   Produk kelautan yang dimaksud disini yaitu pasir laut. Lokasi yang menjadi target pengawasan yaitu di daerah Bangka dan disekitar Batam. Sedangkan yang termasuk dalam jasa kelautan adalah BMKT dan Wisata Bahari. Untuk BMKT lokasi tersebar di daerah Bangka, Belitung, Palembang, Natuna, Batam dan untuk daerah pengawasan Wisata bahari di Bangka, Belitung, Tanjung Pinang dan Batam.

   Pagu anggaran untuk operasional pengawasan jasa kelautan pada tahun 2021 sebesar Rp. 185.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 88.930.000,-. Dari anggaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 88.721.419,- atau 99,77%.

c) Untuk Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sebanyak 17 pelaku usaha yaitu pengawasan yang terdiri dari 1 pelaku usaha di Moro, 1 pelaku usaha di Batam, 1 pelaku usaha di Karimun, 7 pelaku usaha di Bintan dan 7 pelaku

usaha di Anambas. Target daerah pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir disekitar Batam dan Tanjung Pinang. Sedangkan pengawasan pulau-pulau kecil di daerah Batam, Tanjung Pinang, Anambas dan Natuna.

Pagu anggaran untuk Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2021 sebesar Rp. 96.500.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 56.240.000,-. Dari anggaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 55.562.000,- atau 98,79%.

d) Pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang patuh dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sebanyak 9 Pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan di Bintan sebanyak 2 pelaku usaha, Batam sebanyak 5 pelaku usaha dan Palembang sebanyak 2 pelaku usaha.

Alokasi anggaran untuk operasional pengawasan pencemaran perairan pada tahun 2021 yaitu Rp. 44.940.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 37.843.020,- atau 84,21%.

e). Pengawasan Kawasan Konservasi yang dikelola serta pelaku usaha pengelolaan mangrove dan terumbu karang yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 13 pelaku usaha yang terdiri 4 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 6 pelaku usaha di Palembang dan 3 pelaku usaha di Anambas.

Pagu anggaran untuk operasional Pengawasan Kawasan Konservasi yang dikelola serta pelaku usaha pengelolaan mangrove dan terumbu karang pada tahun 2021 sebesar Rp. 307.066.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 305.266.656,- atau 99,41%.

f) Untuk pengawasan pelaku usaha perikanan yang patuh dari kegiatan *Destructive Fishing* lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sebanyak 25 pelaku usaha.

Adapun kegiatan pengawasan dilakukan di Batam sebanyak 7 pelaku usaha, di Karimun sebanyak 3 pelaku usaha dan Tanjung Balai Karimun sebanyak 15 pelaku usaha. Alokasi anggaran untuk operasional pengawasan DF pada tahun 2021 sebesar Rp. 24.540.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 23.996.215,- atau 97,78%.

Sebagaian besar pelaku usaha pengelolaan sumber daya kelautan yang diawasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih terdapat pelaku usaha pengelolaan hasil perikanan yang tidak melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang. Maka kepada pelaku usaha tersebut diarahkah untuk membuat IPAL mandiri untuk mengelola limbah hasil produksi, selain itu juga diarahkan untuk mengurus perizinan terkait AMDAL. Untuk memastikan pelaku usaha telah menindak lanjuti hasil pengawasan, maka akan dilakukan pengawasan secara berkala.

Capaian Pada IKU 1 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 karena pada tahun 2020 tidak terdapat IKU *"Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan".* Namun jika dibandingkan dengan terget pada renstra, target "*Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan"* Pangkalan PSDKP Batam masih konsisten 95%. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya, Pangkalan PSDKP Batam akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu akan selalu melakukan pendampingan dan pemberdayaan POKMASWAS sebagai bahan informasi yang berada pada daerah-daerah.

Capaian IKU 1 pada tahun 2021 melebihi terget yang ditetapkan yaitu 100% dari target 95%. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

yang berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. Selain itu terdapat kegiatan PULBAKET dan koordinasi baik dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 2 (*Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan*),** yaitu:

2) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100	100,00	100

Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya diperoleh dari 4 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$Xp = \frac{(Xkp + Xolh + Xbd + Xdst)}{4}$$

Keterangan:

Xp = Persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya
Xkp = Persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
Xolh = Persentase unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
Xbd = Persentase unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya
Xdst = Persentase usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Xk = \frac{(100\% + 100\% + 100\% + 100\%)}{4}$$

$$Xk = 100\%$$

Presentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya tahun 2021 adalah 100% yang terbentuk dari 4 komponen berikut:

a) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam sejumlah 1981 kapal perikanan. Pada tahun 2021, capaian Komponen "*presentase unit usaha kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya*" mencapai 100%. Kapal perikanan yang diawasi yaitu kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, kecuali kapal pengangkut hasil budidaya/ikan hidup. Pencapaian ini diraih melalui kegiatan antara lain: pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan yang diterbitkan HPK Keberangkatan, pemeriksaan kapal perikanan saat melakukan kegiatan perikanan (penangkapan atau pengangkutan) dalam hal ini pengawas perikanan dapat dilibatkan dalam kegiatan operasi kapal pengawas dan pemeriksaan kapal perikanan saat kedatangan kapal yang diterbitkan HPK Kedatangan. Pemeriksaan kapal perikanan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 12/PER-DJPSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.350/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan.

   Untuk Pagu Pengawasan kapal perikanan dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 392.995.000,-. Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 98,46% atau sebesar Rp 386.932.399,-.

b) Jumlah UPI yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2021 adalah 83 pelaku usaha dengan rincian 8 pelaku usaha di Batam, 20 pelaku usaha

di Palembang, 5 pelaku usaha di Bangka, 8 pelaku usaha di Belitung, 4 pelaku usaha di Anambas, 7 pelaku usaha di Karimun, 2 pelaku usaha di Natuna, 3 pelaku usaha di Tanjungpinang, 12 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat, 6 pelaku usaha di Banyuasin, 2 pelaku usaha di Kijang, 3 pelaku usaha di Lingga dan 3 pelaku usaha di Moro. Pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Surat Edaran Nomor 35625/DJPSDKP/IX/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Bidang Usaha Pengolahan Ikan. Capaian komponen "*Presentase unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam*" tahun 2021 adalah 100%.

Tahun 2021 pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 93.375.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 62.875.000,- Realisasi anggaran pada pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan tahun 2021 adalah Rp. 58.532.300,- atau 93,09%.

c) Jumlah Unit Usaha Budidaya Ikan (UBI) yang diperiksa sejumlah 65 pelaku usaha yang terdiri dari 59 pelaku usaha budidaya dan 6 kapal pesngangkut ikan hidup. Adapun rincian unit usaha budidaya yaitu 9 pelaku usaha di Batam, 2 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat. Kemudian untuk 6 kapal pengangkut ikan hidup yaitu 11 pelaku usaha di Palembang, 7 pelaku usaha di Belitung, 5 pelaku usaha di Anambas, 1 pelaku usaha di Karimun, 7 pelaku usaha di Bintan dan 17 pelaku usaha di Bangka. Kemudian untuk kapal pengangkut ikan hidup yaitu MV. Great Harvest, MV. Charter Wide, MV. Cheung Kam Wah & Cheng Wai Hing, MV. Cheung Kam Wing, Cheung Lai Chun, MV. Fung Kwai Fong dan MV. Cheung Cun Wah, Chan Lai Kuen. Pemeriksaan Unit usaha Budidaya Ikan mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Budidaya dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor

13/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Untuk kapal ikan hidup indikatornya berupak diterbitkannya HPK Keberangkatan dan HPK Kedatangan. Capaian Komponen pembentuk "*Presentase unit usaha budidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSKDP Batam*" tahun 2021 adalah 100%.

Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk pengawasan unit usaha budidaya perikanan sebesar Rp. 249.000.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 238.000.000,- Realisasi unit usaha budidaya ikan yang terawasi terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2021 sebesar Rp. 212.599.900,- atau 89,33%.

d) Jumlah usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa sejumlah 30 pelaku usaha yang terdiri dari UPI dan Kapal pengangkut ikan dengan rincian 6 pelaku usaha di Batam, 5 pelaku usaha di Bangka, 3 pelaku usaha di Karimun, 6 pelaku usaha di Tanjungpinang, 5 pelaku usaha di Belitung, 4 pelaku usaha di Moro dan 1 pelaku usaha di Palembang. Pemeriksaan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 14/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan. Capaian Komponen "*presentase unit usaha distribusi perikanan yang diperiksa kepatuhannya*" tahun 2021 adalah 100%.

Pada tahun 2021 unit usaha distribusi pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 133.572.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 96.800.000,-. Realisasi anggaran tahun 2021 untuk pengawasan usaha distribusi sebesar Rp. 85.119.702,- atau 87,93%.

Sebagaian besar pelaku usaha pengelolaan sumber daya perikanan yang diawasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 telah mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Namun masih terdapat pelaku usaha Budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang masih belum memenuhi syarat administrasi perizinan pada usahanya. Kepada pelaku usaha tersebut diberikan arahan untuk mengurus kekurangan dokumen perizinan pada instansi terkait dan akan dilakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan ketaatan pelaku usahanya.

Capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada IKU *"Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan"* sama yaitu 100%. Tercapaianya terget ini dikarenakan adanya koordinasi serta melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan bersama dengan instansi terkait. Dengan dilaksanakannya pengawasan secara bersama dapat memberikan informasi maupun data tambahan di bidang pengawasan sumber daya perikanan. Jika dibandingkan dengan target pada renstra, IKU *"Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan"* lingkup Pangkalan PSDKP Batam masih konsisten 100%. Untuk mencapai target tersebut maka Pangkalan PSDKP Batam akan berupaya melaksanakan kegiatan pengawasan bersama dengan instansi terkait. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

Evaluasi dan analisis pada IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 3 (*Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat*),** yaitu:

3) Persentase penyelesaian tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU3	Presentase penyelesaian tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas	70	100	71	100	120,00	100

Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 sudah ditindak lanjuti sebesar 100%. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan/laporan Pokmaswas tentang masalah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah ditindak lanjuti dengan jumlah pengaduan/laporan Pokmaswas yang dilaporkan kepada Pangkalan PSKDP Batam. Informasi dari POKMASWAS dapat disampikan melalui:

a) SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/ Satwas; dan

b) Informasi langsung kepada UPT/Satwas.

Kemudian Pangkalan PSDKP Batam akan melakukan tindak lanjut informasi dari POKMASWAS melalui pelaksanaan:

a) Melakukan patroli baik menggunakan kapal pengawas maupun *speedboat;* dan

b) Melakukan mengumpulkan data (pemanggilan, BAP, wawancara dll).

Pada 2021 terdapat informasi dari POKMASWAS mengenai adanya kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat dan yang merusak (*Destructive Fishing*) di perairan sungai Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Informasi tersebut didapat pada saat Satwas SDKP Palembang melakukan pertemuan dengan 10 (sepuluh) POKMASWAS yang didampangi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Juli 2021. Adapun kesepuluh POKMASWAS tersebut yaitu Pokmaswas Ngulak III, Gemuruh Indah, Nelayan Lumbung Mutiara, Rantau Kasih, Mulan Jadi Bersama, Mulan Jadi Sejahtera, Mata Air Musi, Atlas, Sungai Denau dan Danau Ulak Lia. Dari hasil pertemuan tersebut didapat informasi bahwa di hampir seluruh perairan Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kegiatan *Destructive Fishing* berupa setrum dan *potassium*.

Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, tim dari Satwas SDKP Palembang menyusun rencana operasi patroli *Speedboat* diperairan yang dimaksud. Pada bulan Agustus tim melaksanakan patroli pengawasan bersama dengan POLAIRUD serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pelaksanaan kegiatan patroli tersebut didapat beberapa kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang (setrum) sebanyak 6 (enam) unit. Seluruh alat setrum tersebut kemudian di sita dan dilakukan pembinaan terhadap awak kapal. Kemudian anggaran tahun 2021 untuk tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 12.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.933.730,- atau 94,71%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

Pada tahun 2020 maupun 2021 sama terdapat informasi dari POKMASWAS mengenai adanya penggunaan alat tangkap maupun bahan yang dilarang (*Destructive Fishing*) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keberhasilan capaiannya ini karena adanya pendampingan Pangkalan PSDKP Batam kepada POMASWAS sehingga informasi yang diperoleh oleh POKMAWAS dapat langsung disampaikan kepada Satwas maupun Wilker serta ke UPT. POKMASWAS merupakan mitra PSDKP dalam melakukan kegiatan pengawasan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kerawanan pelanggaran. Apabila dibandingkan dengan terget di rensta, Pangkalan PSDKP Batam menargetkan 100% pada akhir renstra sebagai bentuk upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk tindakan untuk meningkatkan kinerja, Pangkalan PSDKP Batam akan terus melakukan pendampingan serta memberikan sosialisasi mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Evaluasi dan analisis pada IKU4 dan IKU5 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 4** (***Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP***) yaitu:

4) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	1,14	1,61	2,76	3,19	115,58	2,80

Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2021 adalah 3,19%. Presentase tersebut merupakan jumlah dari presentase cakupan WPPNRI yang dipantau KP. HIU 03 sebesar 0,65%, KP. HIU MACAN 05 sebesar 0,55% dan KP. HIU 17 sebesar 1,99%. Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau adalah presentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh kapal pengawas dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI. Kegaiatan patroli sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang bebas dari *Ilegal, Unreported an Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yaitu kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di WPPNRI. Rata-rata hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 adalah 110 hari operasi.

Pada kegiatan operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam, KP. HIU Macan 05, KP. HIU 03 serta KP. HIU 17 telah melakukan pemeriksaan pada kapal perikanan dengan total 405 kapal perikanan baik kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing. Dari 405 kapal perikanan tersebut terdapat 16 kapal perikanan

dengan rincian 11 kapal perikanan Indonesia dan 5 kapal perikanan asing yang ditangkap karena terindikasi melakukan pelanggaran.

Capaian *"Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas"* pada tahun 2021 melebihi target yang ditentukan yaitu 3,19% dari target 2,76%, karena kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan kegiatan operasi pengawasan dengan rata-rata jumlah hari operasi 110 hari dan jumlah jam operasi sebanyak 4.211,87 jam. Capaian pada tahun 2021 lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dengan selisih sebesar 1,58%. Hal ini disebabkan terdapat perubahan dua kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang sebelumnya HIU 04 dan HIU 06 (kelas D) menjadi KP. HIU Macan 05 dan HIU 17 (Kelas C). Kapal pengawas kelas C memiliki daya jelajah yang lebih besar dibandingkan dengan kapal pengawas kelas D sehingga cakupan WPP NRI yang dipantau mengalami peningkatan pada tahun 2021. Meskipun kapal baru, namun kapal pengawas HIU 17 merupakan kapal yang cakupannya tertinggi di Pangkalan PSDKP Batam yaitu 1,99%. Hal ini tidak terlepas dari adanya kegiatan *familyrisasi* yang diberikan kepada awak kapal HIU 17, sehingga kegiatan patroli kapal pengawas dapat berjalan dengan lancar dengan armada yang prima. Sebagai upaya peningkatan kinerja dalam hal pengawasan menggunakan kapal pengawas, Pangkalan PSDKP Batam menargetkan 2,80% cakupan wilayah yang diawasi pada akhir renstra. Dengan demikian Pangkalan PSDKP Batam ingin kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan sesuai ketentuan baik dalam hal administrasi maupun teknis.

Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 23.191.516.000,-. Kemudian direvisi menjadi Rp. 20.715.926.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.

20.421.041.963,- atau 98,58% dari pagu. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

5) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,168	0,35	0,35	0,36	102,86	0,72

Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* pada tahun 2021 adalah 0,36%. Presentase tersebut merupakan jumah dari presentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *speedboat/RIB/rubber* boat yang dioperasikan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau adalah presentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI. Kegaiatan patroli sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang bebas dari *Ilegal, Unreported an Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yaitu kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di WPPNRI.

Pada kegiatan operasi *speedboat/RIB/Rubberboat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam, telah melakukan pemeriksaan pada kapal perikanan

dengan total 486 kapal perikanan baik kapal perikanan Indonesia. Dari total 486 kapal perikanan tersebut terdapat 65 kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Terhadap kapal-kapal tersebut dilakukan pembinaan agar lebih mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melakukan operasi penangkapan ikan.

Rata-rata capaian hari Operasi *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 31 hari operasi. Terdapat *speedboat* yang dilakukan perbaikan setelah melaksanakan operasi pengawasan yaitu Napoleon 016, Napoleon 027 dan *Rubber Boat* di Sadai. Capaian IKU *"cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat"* tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,01%. Hal tersebut karena rata-rata adanya selisih capaian hari operasi dan jam operasi pada tahun 2021 dan tahun 2020 dari semula rata-rata 25 hari operasi menjadi 31 hari operasi. Kemudian jumlah jam juga mempengaruhi cakupan wilayah yang dipantau. Semakin tinggi hari dan jam operasi, maka akan semakin luas wilayah yang dipantau jika dimasukan pada formula perhitungan. Untuk memeperluas cakupan wilayah operasinya, Pangkalan PSDKP Batam menaikan target cakupan wilayahnya sebesar 0,72 pada akhir renstra. Hal ini merupakan salah satu upaya Pangkalan PSDKP Batam untuk meningkatkan kinerja pengawasan menggunakan *speedboat.* Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2022 Pangkalan PSDKP Batam mendapat tambahan armada Unit Reaksi Cepat (URC) sebanyak 2 unit yang rencananya akan di tempatkan di Pangkalan PSDKP Batam dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat.

Untuk anggaran tahun 2021 pada operasi *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* sebesar Rp. 3.063.246.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 1.962.287.000,- pada tahun 2021 anggaran yang terealisasi sebesar Rp

1.765.304.448,- atau 89,96% dari pagu anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

Evaluasi dan analisis pada IKU6 dan IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 5** (***Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP***) yaitu:

6) Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU6	Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C	-	-	100	100	100,00	100

Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 100% dan merupakan target tahunan serta kegiatan tersebut tercapai 100%. Pembangunan kapal dikerjakan oleh PT. Palindo Marine yang berlokasi di Batam sebagai pemenang tender yang dilaksanakan *Multi-Years* dan mulai dilakukan pembangunan pada tahun 2020. Kapal pengawas HIU 17 diserah terimakan ke Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 9 Maret 2021. Sebelum dilakukan serah terima, pihak PT. Palindo Marine dan Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan *Familirisasi* bagi calon awak kapal HIU 17 dan *Sea Trial*. Tercapainya target ini dikarenakan pihak ketiga yang ditunjuk merupakan perusahan yang professional. Selain itu juga kegiatan pengawasan pembangunan dilakukan secara berkala sehingga pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Pada IKU 6 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 karena tidak terdapat IKU *"Presentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C"*. Capaian IKU 6 ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pembangunan kapal pengawas 100% selesai pada triwulan I tahun 2021 sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati. Pada saat penyusunan Rencana Strategis 2020-2024, direncanakan pembangunan armada kapal pengawas hanya satu kali yakni pada tahun 2020-2021 dalam satu periode rencana strategis tersebut sehingga tidak terdapat target pembangunan kapal pengawas pada tahun 2024.

Pembangunan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.795.183.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 12.240.006.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.239.832.259,- atau 99,98% dari pagu anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

7) Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU7	Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	-	-	100	100	100,00	100

Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan merupakan presentase penyelesaian perawatan Sarana Pengawasan SDKP yaitu kapal pengawas dan *speedboat* pengawas yang dilaksanakan oleh pangkalan PSKDP Batam dan merupakan target tahunan yaitu 100%. Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 04 dan KP. HIU 06. Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat pengadaan sukucadang dan perlengkapan serta overhaul dan docking Kapal Pengawas, selain itu terdapat pemeliharaan rutin dan darurat yang menunjang operasional Kapal Pengawas di Lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Kemudian untuk speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam yang yang dirawat berjumlah 13 unit. Adapun penyebaran unit speedboat adalah sebagai berikut:

1. Napoleon 015 di Satwas SDKP Palembang;
2. Napoleon 016 di Satwas SDKP Natuna;
3. Napoleon 027 di Satwas SDKP Anambas;
4. Napoleon 035 di Satwas SDKP Bangka;
5. Dolpin 015 di Wilker SDKP Tanjung Balai Karimun;
6. Dolpin 018 di Satwas SDKP Tanjung Pinang;
7. Dolpin 023 di Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat;
8. Dolpin 024 di Wilker SDKP Moro;
9. Dolpin 008 di Satwas SDKP Belitung;
10. Rubber Boat di Wilker SDKP Lingga;
11. Rubber Boat di Wilker SDKP Sadai;
12. Baramundi 01 di Pangkalan PSDKP Batam; dan
13. Rigid Inflatable Boat di Pangkalan PSDKP Batam.

Terdapat dua kapal pengawas yang melakukan *Docking* pada tahun 2021 yaitu KP. HIU 03 serta KP. HIU Macan 05. Pada triwulan III tahun 2021, KP. Hiu Macan 05 dilakukan *general overhaul* yang dilaksanakan di Jakarta. Kemudian terdapat dua *Speedboat* yang dilakukan perbaikan total yaitu Napoleon 027 dan Napoleon 016 serta satu unit *Rubberboat* di Lingga. Pada kapal pengawas dan *speedboat* lain dilakukan perawatan rutin.

Pada IKU 7 tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 karena tidak terdapat IKU *"Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan"*. Tercapainya target ini dikarenakan ada perencaan waktu serta pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan perawatan dan *docking* yang tepat, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada waktu yang ditentukan dengan hasil pekerjaan yang baik. Pada saat dilakukan pekerjaan peran pengawas pekerjaan

dalam monitoring proses perawatan maupun *docking* juga sangat besar untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Agar sarana pengawasan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam selalu dalam kondisi prima, maka pada target renstra konsisten sebesar 100%. Memastikan kondisi sarana pengawasan merupakan sebagai salah satu bentuk upaya mendukung kegiatan pengawasan dibidang kelautan dan perikanan.

Pagu anggaran tahun 2021 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp. 17.505.205.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp.11.701.462.000,- dan realisasi anggaran 99,31% atau sebesar Rp. 11.620.585.729,-. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 dan IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 6** (***Terselenggaranya penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam***) yaitu:

8) Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU8	Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	93	99,03	106,48	93

Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam diukur dengan membandingkan presentase perkembangan proses penyidikan dengan jumlah kasus yang ditangani. Untuk presentase pada tahap penyelesaian proses penyidikan dihitung 100% jika proses sudah sampai dengan tahap P-21 tahap II. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 telah menangani 31 kasus TPKP.

Dari 31 kasus TPKP yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam, terdapat 1 kasus yang masih dalam tahap penyidikan yaitu KM. KG 2118 TS dan 2 kasus tahap

I yaitu KM. SLFA 5038 serta KM. SILIWANG. Kemudian terdapat 2 yang masih tahap P21 yaitu serta 28 kasus yang sudah tahap II yaitu KM. JHF 4631 B, KM. Sari, KM. Garuda Hasil, KM. Surya Jaya Indah-08, KM. Darmawan Mina Abadi, KM. Teguh Harapan-V, KM. Adi Daya-V, KM. Sumber Sejati Baru-2, KM. Danau Toba Permai, KM. BV 4419 TS, KM. BL 93333 TS, KM. KG 9307 TS, KM. TIMUR JAYA 8, KM. SELAT MANDIRI, KM. BD 31185 TS, KM. KNF 7727 TS, KM. BD 93681 TS, KM. KG 90720 TS, KM. KG 93039 TS, KM. SLFA 5269, KM. KHF 1764, KM. KG 92549 TS, KM. KG 92596 TS, KM. KG 90721 TS, KM. SLFA 5219, KM. KG 1834 TS (Kapal tenggelam saat penangkapan), KM. KG 1938 TS dan KM. KG 1448 TS.

Pada IKU 8 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 karena tidak terdapat IKU *"Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam"*. Capaian pada tahun 2021 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 99,03% dari target 93%. Hal ini dikarenakan koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Batam dengan Kejaksaan serta Pengadilan di berbagai wilayah sehingga proses penyelesaian kasus TPKP dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Selain itu juga terdapat penambahan tiga pengawas perikanan yang mengikuti pelatihan PPNS perikanan pada tahun 2021. Untuk mempertahankan kinerja di bidang administrasi penyidikan, maka target pada rensta konsisten sebesar 93%. Sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kasus penyidikan, Pangkalan PSDKP Batam akan selalu bekerjasama dengan instasi terkait lainnya.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 mendapat pagu sebesar Rp 724.855.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 2.460.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.294.384.756,- atau 93,23%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

9) Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU9	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	93	99,22	106,69	93

Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam diukur dengan presentase perkembangan penanganan barang bukti dan awak kapal dengan jumlah kasus yang ditangani. Untuk presentase pada tahap penanganan barbuk dan awak kapal TPKP dihitung 100% jika proses Dari 31 kasus TPKP yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam, terdapat 1 kasus yang masih dalam tahap penyidikan yaitu KM. KG 2118 TS dan 2 kasus tahap I yaitu KM. SLFA 5038 serta KM. SILIWANG. Kemudian terdapat 2 yang masih tahap P21 yaitu serta 28 kasus yang sudah tahap II yaitu KM. JHF 4631 B, KM. Sari, KM. Garuda Hasil, KM. Surya Jaya Indah-08, KM. Darmawan Mina Abadi, KM. Teguh Harapan-V, KM. Adi Daya-V, KM. Sumber Sejati Baru-2, KM. Danau Toba Permai, KM. BV 4419 TS, KM. BL 93333 TS, KM. KG 9307 TS, KM. TIMUR JAYA 8, KM. SELAT MANDIRI, KM. BD 31185 TS, KM. KNF 7727 TS, KM. BD 93681 TS, KM. KG 90720 TS, KM. KG 93039 TS, KM. SLFA 5269, KM. KHF 1764, KM. KG 92549 TS, KM. KG 92596 TS, KM. KG 90721 TS, KM. SLFA 5219, KM. KG 1834 TS (Kapal tenggelam saat penangkapan), KM. KG 1938 TS dan KM. KG 1448 TS.

Adapun barang bukti yang ada di PSDKP Batam yaitu 30 kapal dikarenakan terdapat 1 kapal yaitu KM. KG 1834 TS tenggelam pada saat dilakukan penangkapan

di laut. Kemudian seluruh awak kapal TPKP yang ditangani Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 31 tersangka dan 70 saksi kasus TPKP.

Pada IKU 9 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 karena tidak terdapat IKU *"Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam".* Capaian pada tahun 2021 melebihi target yaitu 99,69% dari target 93%. Tingginya capaian dikarenakan adanya koordinasi dan Kerjasama antara Pangkalan PSDKP Batam bersama Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi dan Rudenim sehingga percepatan keputusan serta penanganan awak kapal TPKP yang dilakukan dengan lancar. Kerja sama ini harus dilakukan secara terus-menerus, agar capaian dapat konsisten serta memenuhi target pada renstra yaitu 93%. Sebagai upaya percepatan penyelesaian awak kapal TPP, Pangkalan PSDKP Batam terus berkoordinasi dengan imigrasi agar proses pemulangan awak kapal *non justicia* dapat berjalan dengan baik. Kemudian terkait barang bukti, koordinasi dengan kejaksaan serta pengadilan akan terus dilakukan dan ditingkatkan agar barang bukti yang disita segera mempunyai kekuatan hukum tetap serta dilakukan eksekusi sesuai dengan keputusan pengadilan.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 mendapat pagu sebesar Rp 806.760.000,- kemudian diadakan revisi Rp. 1.496.580.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.448.037.823,- atau 96,76%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

Evaluasi dan analisis pada IKU10, IK11, IK12, IK13, IK14, IK15, IK16, IK17, IK18 dan IK19 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 7** (***Tata kelola pemerintahan yang baik***) yaitu:

10) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	87,08	80	91,40	114,25	85

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 adalah 91,40. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulan. Pada tahun 2021 di Pangkalan PSDKP Batam nilai 91,40. Kegiatan IKM yang pada tahun sebelumnya per semester diubah menjadi triwulanan untuk mempercepat tindak lanjut kekurangan pada IKM sebelumnya sehingga pelayanan akan semakin baik.

Pada tahun 2020 IKU ini menjadi target tahunan yang dilaksananan pada semester I dan semester II. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi target triwulanan. Pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,08 dan pada tahun 2021 sebesar 91,40. Peningkatan ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Batam melakukan inovasi pada sistem pelayanan. Inovasi tersebut adalah aplikasi NAPOLEON (Pelayanan Pengajuan SLO Online). Selain itu pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima sehingga kualitas pelayanan dapat meningkat. Pada renstra yang terjadi peningkatan target menjadi 85, hal ini menunjukan Pangkalan PSDKP Batam ingin meningkatkan pelayanan pada pengguna jasa. Sebagai bentuk upayanya yaitu akan lebih mempersingkat waktu pelayanan dan mempermudah pengajuan permohonan SLO dengan menggunakan

aplikasi NAPOLEON dan WA Grub bagi kapal perikanan yang telah memenuhi persyaratan. Bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan, maka akan diarahkan untuk melakukan perbaikan dari segi administrasi maupun teknis. Pada tahun 2021 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 38.788.000.- kemudian direvisi menjadi Rp. 35.210.000,- dan terealisasi Rp. 35.061.250,- atau 99,58%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

11) Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK11	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	83,28	75	78,41	104,55	75

Target Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021 adalah 75 dan menjadi target tahunan dan Pangkalan PSDKP Batam memperoleh nilai 78,41. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Selanjutnya, penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tercapainnya target ini dikarenakan adanya pendampingan dari Sekretariat Ditjen. PSDKP serta Inspektorat jenderal KKP. Jika dibandingkan tahun 2020, capaian pada tahun 2021 masih belum optimal yang terdapat selisih 4,81. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pemenuhan dokumen pada beberapa kelompok kerja. Sebagai upaya mempertahankan kinerja, maka pada renstra target tetap konsisten sebesar 75. Kedepannya perlu dilakukan pendampingan serta koordinasi yang lebih untuk meminimalisir kekurangan maupun kesalahan data dukung sebagai rujukan penilaian.

Pagu anggaran untuk pembangunan serta monev pembangunan zona integritas (ZI) sebesar Rp. 65.700.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 50.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.110.000,- atau 100,00%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

12) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	73,3	73	79,03	108,26	73

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2021 adalah 73 dan ditetapkan sebagai target semesteran. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu (1) Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, (2) Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), (3) Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan (4) Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Pada tahun 2021, capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 79,03 dan pada tahun 2020 sebesar 73,3. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pegawai yang mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Sertifikat hasil pelatihan ini dapat menambah indeks professional ASN.

Pada tahun 2020 Indikator Kinerja *"Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam"* merupakan indikator dengan target tahunan, sedangkan pada tahun 2021 menjadi target per semester dan seleruhnya tercapai. Jika dibandingkan target pada renstra, maka terdapat konsistensi target yaitu 73. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan capaian yang sudah dilaksanakan. Untuk

mempertahankan *"Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam"* Pangkalan PSDKP Batam akan mengikutsertakan pelatihan maupun loka karya kepada pegawai yang nilainya masih rendah sehingga memeroleh keahlian serta sertifikat yang dapat menunjang nilai IP ASN.

Adapun anggaran tahun 2021 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai sebesar Rp. 53.600.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 13.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.521.130,- atau 93,44%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

13) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	94,65	90	96,70	107,44	90

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Batam adalah 90 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Pangkalan PSDKP Batam memperoleh nilai 96,70. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

a. Aspek kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila

seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

1). Perjanjian Kinerja;

2). Manual IKU;

3). Rincian Target IKU;

4). Rencana Akasi;

5). LKj/LCK; dan

6). Data dukung LKj/LCK.

b. Aspek kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuainan diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuain, yaitu:

- Kriteria dokumen yang disandingkan:
  1. PK – LKj/LCK;
  2. LKj/LCK – Kinerjaku; dan
  3. PK – Kinerjaku.
- Realisasi:
  1. LKj/LCK TW I – Kinerjaku;
  2. LKj/LCK TW II – Kinerjaku; dan
  3. LKj/LCK TW III – Kinerjaku.
- Informasi data:
  1. Manual IKU – Kinerjaku; dan
  2. Rincian Target IKU – Kinerjaku

c. Aspek ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan Rata-rata NPSS triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulanan bernilai maksimal atau 120.

d. Aspek Ketepatan

Aspek ini merupakan aspek baru dan diterapkan pada pengukuran di tahun 2021. Nilai ketepatan diperoleh dari ketepatan penyampaian LKj tahunan pada aplikasi e-Sakip Reviu dan penyampaian ke atasan. Nilai ini akan bernilai 100 apabila pengumpulan LKj tahunan tidak melebihi batas waktu penyampaian.

Nilai rekonsiliasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 94,65 dan tahun 2021 sebesar 96,70. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim Monev Ditjen. PSDKP, sehingga terjadi perbaikan baik redaksi pada laporan serta ketepatan waktu pengumpulan. Target sebesar 90 akan dipertahankan hingga berakhirnya periode renstra, sehingga kinerja Pangkalan PSDKP Batam tidak mengalami penurunan. Sebagai salah satu bentuk upayanya, Pangkalan PSDKP Batam akan selalu berkoordinasi dengan Tim Monev Ditjen. PSDKP agar capaian yang masih belum optimal dapat dilakukan perbaikan sebelum batas waktu berakhirnya pelaporan. Anggaran untuk rekonsiliasi kinerja pada tahun 2021 sebesar Rp. 165.150.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 139.300.000,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 138.382.965,- atau 99,34%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

14) Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK14	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	1	1	100,00	-

Target inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan ditetapkan sebagai target tahunan dan tercapai. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru melainkan pula mencangkup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayan publik yang ada.

Pangkalan PSKDP Batam dalam inovasinya membuat suatu aplikasi yang dapat menurunkan waktu tunggu di ruang pelayanan sekaligus menjaga privasi data bagi pengguna layanan dalam proses penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) yaitu aplikasi NAPOLEON (Pelayanan Pengajuan SLO Online). Pengguna layanan dalam mengajukan HPK atau SLO hanya membutuhkan waktu 5 menit. Waktu tersebut lebih singkat jika dibandingkan dengan sebelum adanya aplikasi NAPOLEON yaitu membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Dengan adanya pemangkasan waktu tersebut sangat membantu bagi pelaku usaha kapal perikanan dalam melakukan pengajuan

HPK atau SLO. Mengingat wilayan di Pangkalan PSDKP Batam tidak terdapat Pelabuhan Perikanan, namun hanya terdapat Pelabuhan Tangkahan, Serta Pelabuhan tangkahan ini lokasinya sangat berjauhan bahkan berbeda pulau.

Pada tahun 2020 tidak terdapat indikator "*Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam*" sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021. Keberhasilan capaian ini dikarenakan di Pangkalan PSDKP Batam telah memberlakukan sistem Budaya Kerja yang baik sehingga timbul inovasi yang berasal dari pegawai di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Dengan semakin baiknya sistem budaya kerja, maka akan terlihat kekurangan yang ada di unit kerja serta segera dapat melakukan perbaikan. Pada periode renstra 2020-2024 hanya terdapat satu inovasi yang dihasilkan oleh Pangkalan PSDKP Batam dikarenakan akan fokus untuk memaksimalkan inovasi yang sudah ada agar meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada serta lebih mempermudah layanan.

Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 50.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.677.312,- atau 99,99%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

15) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	72,5	100	120,00	72,5

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 72,5 dan ditetapkan sebagai terget tahunan. Pangkalan PSDKP Batam memperoleh nilai 100. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola BMN Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan lancar. Selain itu aset-aset hasil pengadaan telah didukung BAST/Berita Acara Pemakaian yang menandakan adanya kegiatan administrasi yang baik.

Pada tahun 2020 tidak terdapat indikator "*Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam*" sehingga tidak dapat dibandingkan dengan

tahun 2021. Untuk mempertahankan kinerja pengelolaan BMN, pada pada periode renstra 2020-2024 target akan dipertahankan sebesar 72,5. Sebagai upaya mempertahankan capaian, maka pengelola BMN Pangkalan PSDKP Batam akan terus berkoordinasi dengan tim Pengelola BMN Ditjen. PSDKP maupun instansi terkait lainnya.

Pada tahun 2021 pagu tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yaitu penyusunan laporan BMN sebesar Rp. 47.400.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 63.372.000,- Dari pagu tersebut pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 61.784.278,- atau 97,49%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

16) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK16	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	72,5	89,73	120,00	72,5

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 72,5 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Pangkalan PSDKP Batam memperoleh nilai 89,73. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Ketercapaian target ini dikarenakan adanya manajemen resiko yang baik pada pengadaan barang dan jasa di Pangkalan PSKDP Batam. Kemudian Pihak ketiga yang dipilih oleh Pangkalan PSDKP Batam merupakan unit usaha yang profesional serta telah menjalin kerjasama pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 tidak terdapat indikator "*Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam*" sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk mempertahankan kinerja pengelolaan PBJ, maka target pada periode renstra tetap konsisten sebesar 72,5. Sebagai upaya meningkatkan kinerja dibidang pengadaan barang dan jasa, Pangkalan PSDKP Batam telah mengikutsertakan dua pegawai untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2021 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan kendaraan bermotor, alat pengolah data dan komunikasi serta meubelair dengan total anggaran sebesar Rp. 690.000.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 568.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 567.959.800,- atau 99,98%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

17) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	85	84	89,72	106,81	84

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manejemen pengetahuan yang terstandar diperoleh dari komponen pembentuk yaitu (1) dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. (2) keikutsertaan pada aplikasi bitrix24 (Level 3 dan 4) dan (3) keaktifan pada aplikasi bitrix24 (Level 3, 4 dan staf). Pada tahun 2021, persentase sistem manajemen pengetahuan yang terstandar adalah 89,72%.

Pada tahun 2020 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manejemen pengetahuan yang terstandar Pangkalan PSDKP batam sebesar 85%. Pada tahun 2020 pegawai yang mengoperasikan aplikasi *bitrix* pada Pangkalan PSDKP Batam hanya sebanyak 4 pegawai, yaitu pejabat eselon III dan eselon IV. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pegawai yang mengoperasikan bitrix menjadi 10 pegawai dengan ditambahkannya 6 pegawai yang berada di Satuan Pengawasan Pangkalan PSDKP Batam.

Capaian pada tahun 2021 ini melebihi target 3,78% dari target 84% karena jumlah pegawai yang aktif mengoperasikan aplikasi *bitrix* yang semula 4 menjadi 10

pegawai. Kemudian dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manejemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya. Untuk mempertahankan kinerja Manajemen Pengetahuan, target pada renstra tetap konsisten sebesar 84. Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja, maka seluruh operator *bitrix* akan aktif mengirimkan berita dengan ketentuan sesuai dengan syarat penilaian yaitu mengandung 5W+1H. Capaian Manajemen Pengetahuan lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 3 berikut.

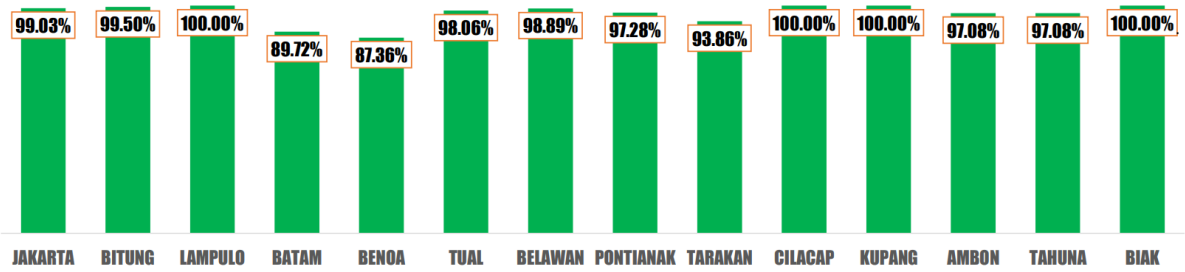

Gambar 3. Grafik Manajemen Pengetahuan

Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manejemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam yaitu publikasi dan dokumentasi Ditjen PSDKP sebesar Rp. 17.098.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 43.188.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.185.000,- atau 99,98%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

18) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK18	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	88	94,06	89	97,08	109,08	89

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 89 (Baik) dan ditetapkan sebagai target per semesteran. Pada tahun 2021 IKPA Pangkalan PSDKP Batam sebesar 97,08 dan memenuhi target. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi DIPA (3) Pengelolaan UP, (4) LPj Bendahara, (5) Data Kontrak, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran Tahun 2021 (8) Retur SP2D, (9) Perencanaan Kas, (10) Pengembalian SPM, (11) Dispensasi SPM dan (12) Pagu Minus.

Gambar 4. Formula Peniaian IKPA Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, pada tahun 2021 lebih tinggi 3,02. Hal ini dikarenakan adanya monitoring pengajuan SPM sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila ada SPM yang salah. Selain itu Pangkalan PSDKP Batam selalu melakukan koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPB serta ada pendampingan untuk meminimalisir kesalahan. Untuk mempertahankan kinerja pengelolaan pelaksanaan anggaran, target pada periode renstra konsisten sebesar

84. Sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian target tersebut, maka Pangkalan PSDKP Batam akan selalu berkoordinasi dengan KPPN maupun Kanwil DJPB dalam hal pengelolaan keuangan.

Adapun anggaran tahun 2021 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 165.150.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 57.822.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 55.860.410,- atau 96,61%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

19) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	86	86,03	100,03	86

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan terget yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap satuan kerja lingku KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Target Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 86 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Pada tahun 2020 tidak terdapat indikator "*Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam*" sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021. Tercapaianya target ini dikarenakan adanya efisiensi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagian besar capaian kegiatan melebihi target yang ditentukan namun penggunaan anggaran masih sesuai dengan pagu. Hal

ini dapat terjadi karena pengawas perikanan melakukan beberapa pengawasan kepada pelaku usaha meskipun dalam satu Surat Perintah Tugas. Untuk mempertahankan kinerja anggaran, pada target pada periode renstra konsisten sebesar 86. Untuk mencapai target ini, maka seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan target atau melebihi.

Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu sebesar Rp. 39.572.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 22.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.637.342,- atau 99,94%. Efisiensi penggunaan anggaran disampaikan pada subbab akuntabilitas keuangan di Tabel 5.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2021 setelah dilakukan *recofusing* pada triwulan III tahun 2021 sebesar Rp. 67.770.785.000,- Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.585.175.000,- dan program dukungan manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.185.610.000,-. Pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp. 66.848.932.086,- atau 98,64%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	46.774.439.000,00	46.191.726.729,00	98,75
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	2.460.850.000,00	2.294.384.756,00	93,24
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	559.216.000,00	548.239.010,00	98,04
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	790.670.000,00	743.184.301,00	93,99
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	17.185.610.000,00	17.071.397.290,00	99,34
TOTAL			67.770.785.000,00	66.848.932.086,00	98,64

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan **"Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355)"** sebesar 99,34%.

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP tahun 2021 terbilang efisien (skala 0-10 0%). Adapun rincian penghitungan dapat dilihat pada tabel 5 berikut

Tabel 5. Efisiensi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA 2021

Sasaran Strategis	Rincian Output pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per RO (CRO)	Alokasi Anggaran (Rp) per RO (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) per RO (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	∑ Alokasi Anggaran (Rp) per RO (AARO)	∑ (AARO x CRO) - RARO	Efisiensi Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)	(10)= ∑ (6)	(11) = ∑ (9)	(12) = (11) / (6)
1	Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	5	13	120%	307.066.000	305.266.656	368.479.200	63.212.544	559.216.000	91.552.190	16,37%
	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites	3	4	120%	37.500.000	36.849.700	45.000.000	8.150.300			
	Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan	21	21	100%	88.930.000	88.721.419	88.930.000	208.581			
	Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7	17	120%	56.240.000	55.562.000	67.488.000	11.926.000			
	Unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	10	9	90%	44.940.000	37.843.020	40.446.000	2.602.980			
	Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan *Destrutive Fishing*	20	25	120%	24.540.000	23.996.215	29.448.000	5.451.785			
2	Kapal Perikanan yang diperiksa Kepatuhannya	1.520	1.981	130%	392.995.000	386.932.399	392.995.000	6.062.601	790.670.000	107.660.699	13,62%
	Unit Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan yang diperiksa Kepatuhannya	27	83	307%	62.875.000	58.532.300	75.450.000	16.917.700			
	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan	48	65	135%	238.000.000	212.599.900	285.600.000	73.000.100			
	Unit Usaha yang Melakukan Distribusi Perikanan	30	30	100%	96.800.000	85.119.702	96.800.000	11.680.298			
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	1	10	120%	12.600.000	11.933.730	15.120.000	100.000	12.600.000	100.000	0,79%
4	Operasi Kapal Pengawas	110	110	100%	20.715.926.000	20.421.041.963	20.715.926.000	294.884.037	22.678.213.000	491.866.589	2,17%
5	Operasional Speed Boat 8 Meter	32	32	100%	687.266.000	648.731.100	687.266.000	38.534.900			
	Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin)	31	31	100%	728.085.000	634.283.938	728.085.000	93.801.062			

	Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)	38	38	100%	285.081.000	280.066.710	285.081.000	5.014.290			
	Operasional Rigid Inflatable Boat	40	40	100%	247.674.000	189.383.200	247.674.000	58.290.800			
	Operasional Rubber Boat	7	7	100%	14.181.000	12.839.500	14.181.000	1.341.500			
6	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas C	1	1	100%	12.240.006.000	12.239.832.259	12.240.006.000	173.741	23.941.468.000	81.050.012	0,34%
7	Armada Pengawasan yang dirawat	16	16	100%	11.701.462.000	11.620.585.729	11.701.462.000	80.876.271			
8	Administrasi Penyidikan	36	31	86%	733.270.000	668.446.933	630.612.200	-37.834.733	2.467.150.000	-172.635.756	-7,00%
	Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi	36	31	86%	237.300.000	177.900.000	204.078.000	26.178.000			
9	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti Kapal	36	31	86%	116.640.000	94.492.500	100.310.400	5.817.900			
	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal	36	31	86%	1.379.940.000	1.353.545.323	1.186.748.400	-166.796.923			
10	Forum Konsultasi Publik (ESP & ESM)	2	2	100%	35.210.000	35.061.250	35.210.000	148.750	1.043.807.000	5.627.513	0,54%
11	Pembangunan Zona Integritas	1	1	100%	48.210.000	48.210.000	48.210.000	0			
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembagunan Zona Integritas	1	1	100%	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0			
12	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	1	1	100%	13.400.000	12.521.130	13.400.000	878.870			
13	Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	1	1	100%	139.300.000	138.382.965	139.300.000	917.035			
14	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	1	1	100%	50.680.000	50.677.312	50.680.000	2.688			
15	Penyusunan Laporan BMN	2	2	100%	63.372.000	61.784.278	63.372.000	1.587.722			
16	Kendaraan bermotor Ditjen PSDKP	1	1	100%	292.000.000	292.000.000	292.000.000	0			
	Alat pengolah data dan komunikasi Ditjen PSDKP	31	31	100%	190.000.000	189.980.000	190.000.000	20.000			
	Meubelair Ditjen PSDKP	39	39	100%	86.075.000	85.979.800	86.075.000	95.200			
17	Publikasi dan Dokumentasi Ditjen PSDKP	1	1	100%	43.188.000	43.185.000	43.188.000	3.000			
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	2	2	100%	57.822.000	55.860.410	57.822.000	1.961.590			
19	Penyusunan Laporan Keuangan	2	2	100%	22.650.000	22.637.342	22.650.000	12.658			

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang paling efisien pada tahun 2021 yaitu pada kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Pada kegiatan tersebut kegiatan yang dilaksanakan Sebagian besar melebihi dari target yang ditentukan dan penggunaan anggaran sesuai dengan pagu. Hal ini karena dalam pelaksanaan satu Surat Perintah Tugas (SPT), terkadang pengawasan dilakukan pada beberapa pelaku usaha sehingga ada efektifitas dalam penggunaan sumber daya anggaran.

BAB IV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran pengawasan SDKP Tahun 2021 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan. Hal tersebut tidak terlepas dari perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2021, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Pengumpulan data Pengawasan masih belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	Melaksanakan rapat setiap triwulan untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang melibatkan pimpinan dan penanggungjawab kegiatan.
2	Masih terdapatnya pelaku usaha kelautan yang belum memahami peraturan perundang-undangan terutama terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai peraturang perundang-undangan terbaru terutama mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salman Mokoginta**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan	Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam
Antam Novambar	**Salman Mokoginta**

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan [%]	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan [%]	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas [%]	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas [%]	2,76
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat [%]	0,69
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C [%]	100
		7. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan [%]	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	8. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	93
		9. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Batam	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam [indeks]	80
		11. Nilai WBK Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSKDP Batam [indeks]	73
		13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	90
		14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSKDP Batam [inovasi]	1
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	72,5
		16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	72,5

		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	84
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	86

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	**Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	44,579,750,000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1,635,615,000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	862,000,000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	925,947,000
2	**Dukungan Manajemen**	
	Dukungan Manajemen Internal	18,115,253,000
Total Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Batam		**66,118,565,000**

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam

Salman Mokoginta

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salman Mokoginta**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan	Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam
Antam Novambar	**Salman Mokoginta**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan [%]	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan [%]	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas [%]	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas [%]	2,76
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat [%]	0,69
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C [%]	100
		7. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan [%]	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	8. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	93
		9. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Batam	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam [indeks]	80
		11. Nilai WBK Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSKDP Batam [indeks]	73
		13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	90
		14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSKDP Batam [inovasi]	1
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	72,5
		16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	72,5
		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	84

		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	86

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	**Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	59,011,750,000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1,635,615,000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	862,000,000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	925,947,000
2	**Dukungan Manajemen**	
	Dukungan Manajemen Internal	18,151,853,000
Total Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Batam		**80,587,165,000**

Jakarta, 24 April 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam

Salman Mokoginta

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salman Mokoginta**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan	Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam
Adin Nurawaluddin	**Salman Mokoginta**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan [%]	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan [%]	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas [%]	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas [%]	2,76
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat [%]	0,35
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C [%]	100
		7. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan [%]	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	8. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	93
		9. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Batam	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam [indeks]	80
		11. Nilai WBK Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSKDP Batam [indeks]	73
		13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	90
		14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSKDP Batam [inovasi]	1
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	72,5
		16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	72,5
		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSKDP Batam [%]	84

		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam [nilai]	86

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	**Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	46.774.439.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	2.460.850.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	559.216.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	790.670.000
2	**Dukungan Manajemen**	
	Dukungan Manajemen Internal	15.811.425.000
Total Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Batam		**67.770.785.000**

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam

Salman Mokoginta